

Analisis Tingkat Kriminalitas Penyalahgunaan Narkotika Antar Provinsi Di Wilayah Pulau Jawa Tahun 2021

Miriam Ratih Handayani, Rahma Asih Nur Fadillah, Septi Nur Azkiyah, Novan Ramadhan
Universitas Jenderal Soedirman

Program Studi S1 Sosiologi FISIP Unsoed

Email: miriam.handayani@mhs.unsoed.ac.id, rahma.fadillah@mhs.unsoed.ac.id,
septi.azkiyah@mhs.unsoed.ac.id, novan.ramadhan@mhs.unsoed.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai tingkat kriminalitas penyalahgunaan narkotika yang berada di antar provinsi wilayah Jawa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan metode analisis data sekunder. Sumber data primer penelitian ini berupa data Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkotika Menurut Polda 2021 yang diambil dari BPS Statistik Kriminal 2022. Sementara, sumber data sekunder berupa jurnal, artikel, buku, dan lain-lain yang mendukung penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkemungkinan untuk menjadi penyebab peningkatan angka kriminalitas penyalahgunaan narkoba di Wilayah Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor penyebab kriminalitas penyalahgunaan narkoba di Wilayah Jawa, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP), tingkat penyelesaian pendidikan, dan tingkat pengangguran terbuka selama tahun 2021. Ketiga faktor tersebut baik secara signifikan maupun tidak signifikan memiliki pengaruh dalam peningkatan penyalahgunaan narkotika di Wilayah Jawa.

Kata Kunci: *Penyalahgunaan Narkotika, Kriminalitas, Narkoba*

ABSTRACT

This article discusses the crime rate of drug abuse in the inter-provincial Java region. This research uses quantitative descriptive method with secondary data analysis method. The primary data source of this research is data on the Number of Narcotics-Related Crimes by Polda 2021 taken from BPS Criminal Statistics 2022. Meanwhile, secondary data sources are journals, articles, books, and others that support research. The purpose of this study is to identify factors that are likely to be the cause of the increase in drug abuse crime rates in the Java Region. The results show that there are three factors that cause drug abuse crime in the Java Region, namely the Provincial Minimum Wage, the level of educational completion, and the open unemployment rate during 2021. These three factors both significantly and insignificantly have an influence in increasing drug abuse in the Java Region.

Keywords: *Narcotics Abuse, Criminality, Drugs*

1. PENDAHULUAN

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Narkoba juga memiliki sebutan lainnya, yaitu Napza. Konsumsi narkoba dengan berbagai macam cara seperti diminum, dihirup, dihisap, ditelan atau disuntikan dapat menimbulkan efek terhadap fungsi kerja otak dan zat adiktif ini secara berkala dapat mengganggu fungsi sosial, fisik dan psikis. Penggunaan narkoba masih menjadi masalah akut di Indonesia, banyaknya kasus yang bermunculan menjadi gambaran bagaimana Indonesia darurat pencegahan narkoba. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti tingkat penyelesaian pendidikan, UMP, hingga jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2021.

Pernyataan tersebut didukung dengan temuan bahwa pada kota-kota besar di Indonesia dapat dikatakan tidak ada daerah yang bebas narkoba (Lukman et al., 2022). Selain itu,

kurangnya pengawasan pihak berwenang terhadap penyalahgunaan narkoba juga membuat pengedar narkoba dengan mudah menargetkan Indonesia sebagai pasar peredarannya. Lalu, lemahnya pengawasan, perkembangan teknologi juga berpengaruh dalam kemudahan narkoba untuk masuk ke suatu daerah. Hal ini menjadi tantangan bagi pihak berwenang terutama aparat penegak hukum.

Pada awalnya Indonesia hanya sebagai tempat transit narkoba. Namun, sekarang menjadi tujuan operasi jaringan narkoba internasional. Rumitnya kasus narkoba yang belum dapat ditangani dengan baik, ditambah dengan peningkatan jumlah kejadian narkoba. Hal ini dapat ditunjukkan dengan data jumlah kejadian kriminalitas narkoba di Indonesia pada periode tahun 2019-2021 yang cenderung meningkat. Menurut BPS Statistik Kriminal (2022), jumlah kejadian kriminalitas narkoba di Indonesia pada tahun 2019 terdapat 36.478 kejadian. Lalu, dua tahun berikutnya angka kejadian kriminalitas narkoba mengalami peningkatan yang tidak terlalu besar, yaitu pada tahun 2020 sebesar 36.611 kejadian, dan pada tahun 2021 sebesar 36.954 kejadian. Dari jumlah kejadian tersebut, provinsi Sumatera Utara menjadi yang paling tinggi jumlah kejadian kriminalitas narkoba sebesar 5.949 kejadian. Disusul DKI Jakarta sebesar 5.810 kejadian, dan peringkat tiga ada di Sumatera Selatan. sebesar 4.055 kejadian. Data dari (Puslitdatin BNN, 2022), jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi pada tahun 2021 adalah Ganja mencapai 41,4%. Lalu, disusul dengan Sabu, Ekstasi, Amfetamin sebesar 25,7%. Sementara, jenis narkoba yang paling sedikit dikonsumsi pada tahun 2021 adalah Obat sakit kepala dicampur dengan soda sebesar 0,2%, dan Ketamin sebesar 0,3%.

Berbagai jenis narkoba yang digunakan juga dipengaruhi oleh rentang usia dan kelas sosial. Penyalahgunaan narkoba telah dilakukan oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Kasus narkoba di Indonesia kerap ditemukan dengan pengguna tertinggi berasal dari kalangan remaja. Hal ini karena pada masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada masa ini, mereka cenderung melakukan berbagai hal demi mengikuti tren gaya hidup. Para remaja tidak memikirkan baik buruknya terhadap hal yang mereka lakukan termasuk dalam penggunaan narkoba ini.

Menurut Lukman et.al (2022) remaja rentan menyalahgunakan narkoba karena sedang berada dalam fase mencari jati diri. Remaja cenderung menyerap berbagai nilai dan norma baru yang dianggap dapat memperkuat jati dirinya. Selain itu disebutkan juga oleh (Novriansyah Y et al., 2023) bahwa pengguna narkoba bisa berasal dari berbagai kalangan baik pelajar, mahasiswa, pekerja, Pegawai Negeri Sipil, Ibu Rumah Tangga bahkan kalangan selebritis. Kalangan masyarakat yang paling rawan terpapar penyalahgunaan narkoba berada pada rentang

usia 15 sampai 35 tahun atau generasi milenial. Hal ini terbukti dalam data kominfo 2021 yang menyebutkan bahwa pengguna narkoba paling banyak berada di kalangan anak muda berusia 15-35 tahun dengan persentase sebanyak 32,4% berstatus sebagai pemakai, 47,1 % berperan sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir.

Penelitian serupa sebelumnya dilakukan oleh (Arsyad, 2020). Penelitian tersebut mengenai narkoba menggunakan dilihat dari perspektif psikologi, ditunjang dengan *Theory Of Planned Behavior* (TPB). Penelitian tersebut menyatakan bahwa sikap remaja memiliki pengaruh yang kuat terhadap keinginan melakukan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, persepsi remaja yang tinggi untuk melakukan penyalahgunaan narkoba juga meningkatkan resiko remaja tersebut untuk memakai narkoba. Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh (Nebi, 2019), namun menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pada kedua penelitian tersebut membahas faktor penyebab dari penggunaan narkoba tanpa menggunakan data. Oleh karena itu, penelitian kali ini menghadirkan pembaharuan yang belum ada dari penelitian sebelumnya. Pembaharuan tersebut berupa, peneliti menggunakan pendekatan sosiologis dan menghadirkan data mengenai faktor penyebab penggunaan narkoba.

Berdasarkan pada paparan dan penjelasan di atas penulis bertujuan untuk menulis artikel dengan judul "Analisis Tingkat Kriminalitas Penyalahgunaan Narkotika Antar Provinsi Di Wilayah Pulau Jawa Tahun 2021". Pemilihan penelitian di wilayah pulau Jawa karena wilayah tersebut merupakan wilayah yang memiliki banyak kota padat penduduk (Ibrohim, 2023). Hal tersebut membuat kemungkinan terjadinya tindak kriminalitas berupa penyalahgunaan narkoba semakin besar terjadi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berupaya mengumpulkan informasi mengenai suatu fenomena atau gejala, yaitu keadaan yang ada pada saat penelitian. Oleh karena itu, tujuan penelitian deskriptif adalah membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Payuyasa, 2017).

Jenis penelitian kuantitatif yang digunakan, yaitu analisis data sekunder dengan teknik pengumpulan informasi berupa dokumentasi. Sumber data utama yang digunakan adalah data Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkotika Menurut Polda 2021 yang diambil dari BPS Statistik Kriminal 2022. Sementara, sumber data sekunder berupa jurnal, artikel, buku, dan lain-lain yang mendukung penelitian. Analisis ini akan berfokus kepada provinsi yang ada di

Wilayah Jawa, yaitu provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Data dianalisis menggunakan uji korelasi dengan tujuan untuk mendapat hubungan antara kasus penyalahgunaan narkoba dengan tingkat Upah Minimum Provinsi (UMP), tingkat penyelesaian pendidikan, dan tingkat pengangguran terbuka selama tahun 2021.

3. HASIL PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan data Statistik Kriminalitas 2022. Data tersebut diambil dari 6 data provinsi di Indonesia yang merupakan bagian Pulau Jawa. Provinsi tersebut meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Data yang diambil berupa jumlah kejadian penyalahgunaan narkoba. Berikut ini disajikan beberapa hasil pengolahan data dari BPS Statistik Kriminalitas 2022.

Jumlah kejadian penyalahgunaan narkoba merupakan jumlah kasus kejadian penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya yang terjadi pada suatu daerah. Sebagai negara berkembang, Indonesia merupakan tempat sasaran yang sangat potensial bagi pengedaran narkoba secara ilegal. Penggunaan narkoba dan peredarannya telah menjangkau seluruh wilayah dan tidak mengenal strata sosial masyarakat. Saat ini penyalahgunaan narkoba tidak hanya menimpa masyarakat yang tidak berpendidikan, tetapi sudah merambah ke semua kalangan bahkan masyarakat yang berpendidikan (Hariyanto, 2018). Selain itu, lemahnya kontrol pemerintah terhadap perdagangan narkoba juga semakin memudahkan para pengedar narkoba melakukan transaksinya khususnya di wilayah Jawa yang merupakan daerah dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia.

Data yang disajikan merupakan sumber data primer, yaitu Data Statistik Kriminal 2022 yang sudah diolah dalam bentuk persentase. Persentase jumlah kejadian penyalahgunaan narkoba dihitung dari jumlah kejadian penyalahgunaan narkoba suatu wilayah dibagi dengan total jumlah kejadian penyalahgunaan narkoba keseluruhan dan dikalikan 100 %.

Tabel 1. Jumlah Kejadian Penyalahgunaan Narkoba Pada Tahun 2021

Wilayah	Jumlah Kejadian Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021
DKI Jakarta	48,46%
Banten	4,71%
Jawa Barat	6,31%
Jawa Tengah	13,95%
Jawa Timur	23,96%
DI Yogyakarta	2,60%
Jumlah	100%

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Tabel 1 menunjukkan besaran persentase jumlah kejadian penyalahgunaan narkoba tahun 2021 yang terdapat di Pulau Jawa. Wilayah Jawa Tengah memiliki persentase sebesar 13,95%. Wilayah Jawa Timur persentase jumlah kejadian penyalahgunaan narkoba yang terjadi lebih tinggi yaitu 23,96%. Hal ini berbeda dengan wilayah Jawa Barat dan Banten yang cenderung memiliki persentase lebih kecil dari kedua wilayah tersebut yaitu 6,31% dan 4,71%. Kemudian DKI Jakarta menjadi wilayah yang memiliki jumlah kejadian narkoba tertinggi dengan persentase sebesar 48,46%. Sementara wilayah DI Yogyakarta menjadi wilayah yang memiliki jumlah kejadian narkoba terendah dengan persentase sebesar 2,60%. Jumlah kejadian penyalahgunaan narkoba dapat dianalisis dengan faktor penyebab berupa Upah Minimum Provinsi (UMP), tingkat pendidikan, dan jumlah penduduk.

Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan upah minimum yang berlaku di seluruh kabupaten dan kota di satu provinsi tertentu. Penetapan standar UMP di setiap provinsi berbeda. Hal ini karena adanya variasi tingkat kehidupan dan biaya hidup di setiap daerah. UMP ditetapkan oleh gubernur untuk mencangkup satu provinsi dengan pertimbangan ekonomi dan ketenagakerjaan, berupa variabel daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah. Penyesuaian nilai upah diberlakukan setiap tahunnya dengan syarat tertentu (Finaka, 2020).

Tabel 2. Upah Minimum Provinsi (juta rupiah) pada 2021

.Wilayah	Upah Minimum Pendapatan
DKI Jakarta	4.416.186,00
Banten	2.460.996,00
Jawa Barat	1.810.351,36
Jawa Tengah	1.798.979,12
Jawa Timur	1.868.777,08
DI Yogyakarta	1.765.000,00

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Tabel 2 menunjukkan besaran upah yang didapatkan pekerja pada Pulau Jawa. Pada wilayah Jawa Tengah Upah minimumnya sebesar 1,798,979. Pada wilayah Jawa Timur Upah Minimumnya sedikit lebih besar dibandingkan Jawa Tengah, sebesar 1,868,777,08. Jawa Barat memiliki UMR 1,810,351,36. Daerah Banten memiliki UMR sebesar 2,460,996. Daerah DKI Jakarta memiliki UMR paling tinggi dibandingkan 6 wilayah lain di Pulau Jawa sebesar 4,416,186. UMR pada DI Yogyakarta sebesar 1,765,000.

Berdasarkan tabel 1 dan 2 nilai korelasi upah minimum provinsi dengan jumlah kejadian narkoba adalah sebesar 0,837, dengan nilai signifikansi sebesar 0,038. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara upah minimum provinsi dengan jumlah kejadian penyalahgunaan narkoba (dengan arah yang positif). Artinya, semakin tinggi upah minimum provinsinya maka akan semakin tinggi pula jumlah kejadian penyalahgunaan narkoba yang terjadi. Sebaliknya, jika upah minimum provinsinya kecil maka jumlah kejadian narkobanya juga kecil.

Dari tabel 1 dan 2 ditemukan bahwa DKI Jakarta memiliki jumlah UMP tertinggi dan kasus penggunaan narkoba terbanyak. Hal ini didukung dengan kenyataan bahwa DKI Jakarta adalah wilayah tujuan utama migrasi yang menyebabkan masalah kepadatan penduduk pada daerah tersebut. Para migran berharap bahwa bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun, kenyataan lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah penduduk dan pendatang. Dari permasalahan tersebut maka timbul kemiskinan dan pengangguran. Kedua hal tersebut dapat memberikan kontribusi terjadinya kriminalitas (Handayani, 2017).

Selain Upah Minimum Provinsi, faktor penyebab jumlah kejadian penyalahgunaan narkoba juga dapat dianalisis melalui tingkat penyelesaian pendidikan. Menurut BPS Statistik

Pendidikan (2021), tingkat penyelesaian pendidikan merupakan indikator yang mampu menggambarkan capaian pendidikan penduduk yang dilihat melalui minimal jenjang pendidikan yang ditamatkan pada usia referensi tertentu. Usia referensi tingkat penyelesaian sekolah yang ditetapkan UNESCO (*The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) diperoleh dengan cara menambah 3-5 tahun di atas usia yang umumnya siswa menduduki kelas terakhir suatu jenjang pendidikan tertentu.

Indonesia menggunakan indikator menurut UNESCO tersebut dengan penyesuaian umur referensi. Pada penghitungan indikator nasional, umur referensi yang digunakan adalah 1-3 tahun di atas usia siswa yang umumnya telah menduduki kelas terakhir dari tiap jenjang pendidikan. Dengan demikian terdapat tiga umur referensi pada penghitungan tingkat penyelesaian sekolah di Indonesia, yaitu: tingkat penyelesaian SD/Sederajat umur 13-15 tahun, tingkat penyelesaian SMP/Sederajat umur 16-18 tahun, dan tingkat penyelesaian SMA/Sederajat penduduk umur 19-21 tahun. Umur yang digunakan dalam penghitungan tingkat penyelesaian sekolah adalah umur pada awal tahun pembelajaran.

Tabel 3. Indeks pendidikan pada 2021

Wilayah	SD	SMP	SMA
DKI Jakarta	99,26	95	84,98
Banten	98,82	90,63	66,9
Jawa Barat	98,45	88,18	64,89
Jawa Tengah	98,06	88,44	59,9
Jawa Timur	97,76	90,3	66,33
DI Yogyakarta	98,48	94,94	90,12

Sumber: Data sekunder diolah 2021

Tabel 3 menunjukkan tingkat penyelesaian pendidikan yang telah dicapai oleh seluruh pulau di Jawa. Jawa Tengah sebesar 98,06% sudah menyelesaikan sekolah dasar, sebesar 88,44% sudah menyelesaikan pembelajaran di sekolah menengah pertama dan pada 59,9% sudah menyelesaikan pembelajaran di sekolah menengah akhir. Jawa Timur sebesar 97,76% sudah menyelesaikan pembelajaran di sekolah dasar, sebesar 90,3% sudah menyelesaikan pembelajaran di tingkat sekolah menengah pertama dan sebesar 66,33% sudah menyelesaikan pembelajaran di tingkat sekolah menengah akhir. Jawa Barat sebesar 98,45% sudah menyelesaikan pembelajaran di sekolah dasar, sebesar 88,18% sudah menyelesaikan pembelajaran di tingkat sekolah menengah pertama dan sebesar 64,89% sudah menyelesaikan pembelajaran di tingkat menengah akhir. Banten sebesar 98,82% sudah menyelesaikan pembelajaran di tingkat sekolah dasar, sebesar 90,63% sudah menyelesaikan pembelajaran di

sekolah menengah pertama dan sebesar 66.9% sudah menyelesaikan pembelajaran di sekolah menengah akhir. DKI Jakarta sebesar 99,26% sudah menyelesaikan pembelajaran di sekolah dasar, sebesar 95% sudah menyelesaikan pembelajaran di sekolah menengah pertama sebesar 84,98%. Dari hasil korelasi menggunakan tabel 3 didapatkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba dengan tingkat pendidikan memiliki nilai yang positif namun tidak signifikan. Pada sekolah dasar memiliki tingkat korelasi sebesar 0,365 dengan nilai p (Sig.) Atau signifikan sebesar 0,477. Pada sekolah menengah pertama memiliki tingkat korelasi sebesar 0,404 dengan nilai signifikansi sebesar 0,427. Pada sekolah menengah akhir memiliki tingkat korelasi sebesar 0,266 dengan tingkat signifikan sebesar 0,611.

Rata-rata tingkat pendidikan paling tinggi berada di DI Yogyakarta sebanyak 94,51% warganya sudah mengikuti program pendidikan formal. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, mencatat bahwa sebanyak 17,12% pemuda di DI Yogyakarta menamatkan pendidikannya hingga perguruan tinggi. Tingginya persentase tersebut menjadikan DI Yogyakarta sebagai provinsi yang pemudanya paling banyak menamatkan hingga perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini tentunya tidak lepas dari julukan DI Yogyakarta sebagai kota pelajar. Julukan tersebut didapatkan karena banyak pusat-pusat pendidikan berdiri di Yogyakarta. Lebih dari 100 lembaga pendidikan berdiri di DI Yogyakarta baik swasta maupun negeri (Adryamarthanino & Indriawati, 2023)

Pengangguran juga menjadi salah satu faktor penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Pengangguran merupakan kondisi seseorang ingin bekerja, tetapi tidak atau belum dapat menemukannya. Penyebab pengangguran terjadi karena berbagai faktor, seperti kurangnya lapangan pekerjaan yang menampung para penari kerja, kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja, kurangnya akses informasi untuk mengetahui perusahaan yang memiliki kekurangan pekerjaan, kurangnya pemerataan pekerjaan di setiap daerah di Indonesia, dan budaya malas yang masing menjangkit para pencari kerja (Franita & Fuady, 2019).

Pengangguran bisa dikatakan sebagai perbedaan antara penggunaan tenaga kerja dengan jumlah angkatan kerja (penduduk kerja usia 15 tahun ke atas). Sementara itu, istilah pengangguran terbuka merupakan keadaan seseorang tidak mempunyai pekerjaan dan dalam keadaan pencarian kerja, orang tanpa pekerjaan dan sedang menyiapkan usaha, orang tanpa pekerjaan dan tidak dalam proses pencarian kerja, termasuk juga orang dengan pekerjaan dan belum memulai kerja (Putri & Azzahra, 2021). Perhitungan pengangguran terbuka dapat diketahui melalui Tingkat Pengangguran Terbuka yang dipublikasikan oleh BPS. Tingkat

Pengangguran Terbuka menurut BPS merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Tabel 4. Tingkat Pengangguran Terbuka 2021

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka 2021 (persen)
DKI Jakarta	8,50 %
Banten	8,98 %
Jawa Barat	9,82 %
Jawa Tengah	5,95 %
Jawa Timur	5,74 %
DI Yogyakarta	4,56 %

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021

Tabel 4 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Barat sebesar 9,82%. Disusul oleh Provinsi Banten sebesar 8,98% dan DKI Jakarta sebesar 8,50%. Sementara, tingkat pengangguran terbuka terendah ada di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 4,56%, lalu disusul dengan Jawa Timur sebesar 5,74 % dan Jawa Tengah sebesar 5,95 %.

Berdasarkan tabel 4 nilai korelasi tingkat pengangguran terbuka dengan jumlah kejadian penyalahgunaan narkoba adalah sebesar 0,124, dengan nilai p (sig.) sebesar 0,815. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang sangat rendah/ lemah antara tingkat pengangguran terbuka dan jumlah kejadian penyalahgunaan narkoba (dengan arah positif), tetapi hubungan antara kedua variabel tersebut tidak signifikan. Artinya, semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka, maka akan semakin tinggi pula jumlah kejadian penyalahgunaan narkoba yang terjadi. Sebaliknya, jika tingkat pengangguran terbukanya kecil maka jumlah kejadian penyalahgunaan narkobanya juga kecil.

Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi. Hal ini dikarenakan lapangan pekerjaan di Jawa Barat sangat banyak, tetapi pelamar kerjanya juga banyak terutama para pendatang dari luar Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil Sakernas BPS Agustus 2022, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Jabar

adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 23,19 persen (Rilis Humas Jabar;Rep Teguh, 2023).

4. KESIMPULAN

Artikel ini bertujuan untuk memperoleh korelasi penyalahgunaan narkoba di Wilayah Pulau Jawa pada tahun 2021 dengan melibatkan tiga variabel. Beberapa variabel tersebut yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP), tingkat penyelesaian pendidikan, dan tingkat pengangguran terbuka. Temuan artikel menunjukkan bahwa dari ketiga variabel ditemukan korelasi masing-masing. Korelasi penyalahgunaan narkoba dengan variabel UMP menunjukkan hubungan yang cukup kuat (dengan arah positif). Hal tersebut ditunjukkan dengan ditemukannya nilai korelasi sebesar 0,837 dengan nilai signifikansi sebesar 0,038. Korelasi penyalahgunaan narkoba dengan variabel tingkat penyelesaian pendidikan juga menunjukkan hubungan yang positif, namun tidak signifikan. Hal ini ditunjukkan jenjang SD memiliki tingkat korelasi sebesar 0,365 dengan nilai signifikansi sebesar 0,477. Jenjang SMP memiliki tingkat korelasi sebesar 0,404 dengan nilai signifikansi sebesar 0,427. Sementara jenjang SMA memiliki tingkat korelasi sebesar 0,266 dengan tingkat signifikan sebesar 0,611. Kemudian korelasi penyalahgunaan narkoba dengan variabel tingkat pengangguran terbuka menunjukkan hubungan yang sangat rendah/ lemah (dengan arah positif), tetapi hubungan antara kedua variabel tersebut tidak signifikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai korelasi sebesar 0,124 dan nilai signifikansi 0,815.

DAFTAR PUSTAKA

- Adryamarthanino, V., & Indriawati, T. (2023), September 1. *Mengapa Yogyakarta Disebut sebagai Kota Pelajar ?* Kompas.Com. <https://www.kompas.com/stori/read/2023/09/01/180000479/mengapa-yogyakarta-disebut-sebagai-kota-pelajar->
- apindokaltara.com. (2021). *upah minimum provinsi jawa barat tahun 2021*. Apindokaltara.Com. <https://www.apindokaltara.com/regulasi/upah/UMP%20Jabar%20Tahun%202021.pdf>
- Arsyad, I. F. (2020). Pengaruh Sikap, Norma Sosial, Persepsi Perilaku terhadap Intensi Penggunaan Narkoba di Kalangan Remaja. *AL MA'ARIEF : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*, 1(2), 118–124. <https://doi.org/10.35905/almaarief.v1i2.1088>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Pendidikan 2021*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Kriminal 2022* (S. ST. , M. Si. Rahayu T. E. & S. Si. , M. Si. Setiyowati D, Eds.). Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=NDAYmMqzMzUxYmYzYTA1YWE2MTk4MDY1&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjIvMTEvMzAvNDAYmMqzMzUxYmYzYTA1YWE2MTk4MDY1L3>

- N0YXRpc3Rpay1rcmltaW5hbC0yMDIyLmh0bWw%3D&twoadfnorfeauf=MjAyMy0xMS0yMSAxODoxND0Mg%3D%3D
- banten.bps.go.id. (2020a). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Persen), 2020-2022*. Banten.Bps.Go.Id. <https://banten.bps.go.id/indicator/6/156/1/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-tpak-menurut-kabupaten-kota.html>
- banten.bps.go.id. (2020b). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Persen), 2020-2022*. Banten.Bps.Go.Id. <https://banten.bps.go.id/indicator/6/157/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kabupaten-kota.html>
- banten.bps.go.id. (2020c). *Upah Minimum Kabupaten/Kota per Bulan di Provinsi Banten (Rupiah), 2020-2022*. Banten.Bps.Go.Id. <https://banten.bps.go.id/indicator/19/185/1/upah-minimum-kabupaten-kota-per-bulan.html>
- bps.go.id. (2020a). *Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin*. Bps.Go.Id. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1177/sdgs_11/1
- bps.go.id. (2020b). *Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Provinsi 2020-2022*. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/indicator/28/1980/1/tingkat-penyelesaian-pendidikan-menurut-jenjang-pendidikan-dan-provinsi.html>
- Budianto, Y., Purwanti, A., & Indraswari, D. L. (2023), May 5. *Daerah Tujuan Migrasi Menyimpan Banyak Masalah*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/05/05/daerah-tujuan-migrasi-memiliki-banyak-masalah>
- Finaka. (2020). *Penetapan Upah Minimum dalam Turunan Cipta Kerja | Indonesia Baik*. Indonesiabaik.Id. <https://indonesiabaik.id/infografis/penetapan-upah-minimum-dalam-turunan-cipta-kerja>
- Franita, R. , & Fuady, A. (2019). ANALISA PENGANGGURAN DI INDONESIA. *Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial)*, 2. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/97/97>
- gunungkidulkab.bps.go.id. (2020). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2020-2022*. Gunungkidulkab.Bps.Go.Id. <https://gunungkidulkab.bps.go.id/indicator/6/169/1/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-menurut-kabupaten-kota.html>
- Handayani, R. (2017). Analisis Dampak Kependudukan terhadap Tingkat Kriminalitas di Provinsi Banten. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2). <https://doi.org/10.31506/jap.v8i2.3312>
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>
- Ibrohim, A. N. (2023), May 24. *5 Kota Terpadat di Indonesia, Mayoritas di Pulau Jawa*. Daerah.Sindonews.Com. <https://daerah.sindonews.com/read/1107287/174/5-kota-terpadat-di-indonesia-mayoritas-di-pulau-jawa-1684915533>
- jabar.bps.go.id. (2021a). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2021-2023*. Jabar.Bps.Go.Id. <https://jabar.bps.go.id/indicator/6/89/1/tpak-kabupaten-kota.html>
- jabar.bps.go.id. (2021b). *Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota (Persen), 2021-2023*. Jabar.Bps.Go.Id. <https://jabar.bps.go.id/indicator/6/73/1/tingkat-pengangguran-terbuka-kabupaten-kota.html>
- jabarprov.go.id. (2022). *UMP 2022 Jabar Rp1.841.487,31 Win-win Solution, Berlaku bagi Pekerja di Bawah Satu Tahun*. Jabarprov.Go.Id. <https://jabarprov.go.id/berita/ump-2022-jabar-rp1-841-487-31-win-win-solution-berlaku-bagi-pekerja-di-bawah-satu-tahun-3160>

- jakarta.bps.go.id. (2019). *Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta (Rupiah), 2019-2021*. Jakarta.Bps.Go.Id. <https://jakarta.bps.go.id/indicator/13/1236/1/upah-minimum-provinsi-dki-jakarta.html>
- jakarta.bps.go.id. (2020a). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 2020-2022*. Jakarta.Bps.Go.Id. <https://jakarta.bps.go.id/indicator/6/772/1/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja.html>
- jakarta.bps.go.id. (2020b). *Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen), 2020-2022*. Jakarta.Bps.Go.Id. <https://jakarta.bps.go.id/indicator/6/45/1/tingkat-pengangguran-terbuka.html>
- jateng.bps.go.id. (2020a). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (Persen), 2020-2022*. Jateng.Bps.Go.Id. <https://jateng.bps.go.id/indicator/6/63/1/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-tpak-.html>
- jateng.bps.go.id. (2020b). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen), 2020-2022*. Jateng.Bps.Go.Id. <https://jateng.bps.go.id/indicator/6/64/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-.html>
- jatengprov.go.id. (2020). *UMK 2021 di Jateng Naik Hingga 3,68 Persen*. Jatengprov.Go.Id. <https://jatengprov.go.id/publik/umk-2021-di-jateng-naik-hingga-368-persen/>
- jatim.bps.go.id. (2020). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Kabupaten/Kota, 2020-2022*. Jatim.Bps.Go.Id. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2022/11/09/2402/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-dan-tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-tpak-menurut-kabupaten-kota-2020-2022.html>
- jatim.bps.go.id. (2021). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2021-2023*. Jatim.Bps.Go.Id. <https://jatim.bps.go.id/indicator/6/54/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-provinsi-jawa-timur.html>
- kompas.com. (2020), November 22. *Daftar Lengkap Rincian UMK di 35 Kabupaten Kota Se-Jawa Tengah di 2021*. Kompas.Com. <https://amp.kompas.com/money/read/2020/11/22/090200926/daftar-lengkap-rincian-umk-di-35-kabupaten-kota-se-jawa-tengah-di-2021>
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2022). Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 405. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.36796>
- Nebi, O. (2019). Faktor Penyebab Pengguna Narkotika di Kalangan Masyarakat. *Wajah Hukum*, 3(1), 81. <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i1.59>
- Novriansyah Y, Herawati, Supriyati, Darham Wahid, & Bela Putra. (2023). Strategi Pemberantasan Peredaran Narkoba Menuju Kabupaten Bungo Bersih Narkoba (Bersinar). *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 2(2), 169–178. <https://doi.org/https://doi.org/10.30640/cakrawala.v2i2.1105>
- Payuyasa, I. N. (2017). Analisis Wacana Kritis Model Van Dijk Dalam Program Acara Mata Najwa Di Metro Tv. *Segara Widya: Jurnal Penelitian Seni*, 5. <https://doi.org/10.31091/sw.v5i0.188>
- probolinggokab.bps.go.id. (2021). *Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Rupiah), 2021-2023*. Probolinggokab.Bps.Go.Id. <https://probolinggokab.bps.go.id/indicator/19/288/1/upah-minimum-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html>
- Puslitdatin BNN. (2022). *Indonesia Drugs Report Tahun 2022*. ppid.bnn.go.id. <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/08/IDR-2022.pdf>
- Putri, A., & Azzahra, A. (2021). Perbandingan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Sebelum dan Sesaat Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(2), 71. <https://doi.org/10.24036/jkep.v3i2.13605>

- Rilis Humas Jabar;Rep Teguh. (2023). *Pengangguran Terbuka Jabar Terus Menurun Setiap Tahun*. Jabarprov.Go.Id. <https://jabarprov.go.id/berita/pengangguran-terbuka-jabar-terus-menurun-setiap-tahun-8489>
- yogyakarta.bps.go.id. (2020). *Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kot (Persen), 2020-2022*. Yogyakarta.Bps.Go.Id. <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/6/291/1/tingkat-pengangguran-terbuka-kab-kot.html>
- yogyakarta.bps.go.id. (2021). *Upah Minimum Kabupaten/Upah Minimum Provinsi di DI Yogyakarta (Rupiah), 2021-2023*. Yogyakarta.Bps.Go.Id. <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/6/272/1/upah-minimum-kabupaten-upah-minimum-provinsi-di-di-yogyakarta.html>